

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Aristoteles. (2008). Politik (La Politica), diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh Syamsur Irwan Khairie. Visimedia.

Aartje Tehupeiory (2012) Pentingnya Pendaftaran Tanah di Indonesia. Jakarta: Raih Asa Sukses.

Chomzah, A. A. (2004). Hukum Agraria (Pertanahan Indonesia) (p. 74).

Florianus, S. S. (2007). TATA CARA MENGURUS SERTIFIKAT TANAH. Transmedia Pustaka. (23-24)

Harsono, Boedi. (2003). HUKUM AGRARIA INDONESIA, Jilid 1, Penerbit Djambatan. (26)

Handoko Widhi (2014) *Kebijakan Hukum Pertanahan Sebuah Refleksi Keadilan Hukum Progresif*. Yogyakarta: Thafa Media.

Haposan, S. (2016) 'PENERAPAN PRINSIP NEGARA HUKUM DI INDONESIA', 18(2), pp. 131–137.

Ketut, S. O. I. (2023). HUKUM AGRARIA (Budiman Amin (ed.); Edisi Revisi). (162)

Ketut, S.O.I. (2023) *HUKUM AGRARIA*. Edisi Revi. Edited by Budiman Amin. Bandung: Penerbit Reka Cipta.

Kurniati, N. (2011) *Hukum Agraria Sengketa Pertanahan Penyelesaiannya Melalui Arbitrase Dalam Teori Dan Praktik*. Bandung: Refika Aditama.

- Mochtar, K. (2000) *Pengantar Ilmu Hukum*. Bandung: P.t. ALUMNI.
- Parlindungan, A.P. (1998) *Pendaftaran Tanah di Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.
- Prakoso, D., & Purwanto, B.A. (2017) *Eksistensi Prona Sebagai Pelaksanaan Mekanisme Fungsi Agraria*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Rusmadi Murad (2013) *Administrasi Pertanahan*. Edisi Revi. Mandar Maju.
- Santoso, A.M. (2014) *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Santoso, U. (2011a) *Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Santoso, U. (2011b) *Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Soerjono, S. (2014) *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sudiyat, I. (1978) *Hukum Adat, Sketsa Asas*.
- Yamin, L. and Lubis, R. (2010) *Hukum Pendaftaran Tanah*. Bandung: Mandar Maju.

B. Peraturan Perundang-Undangan

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen Ke-IV.
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah
4. Peraturan Menteri Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.
5. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2015 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang
6. Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.
7. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan

C. Sumber Lain

1. Jurnal

- Bur, A. and Apriani, D. (2017) 'Sertifikat Sebagai Alat Pembuktian Yang Kuat Dalam Hubungannya Dengan Sistem Publikasi Pendaftaran Tanah', *UIR Law Review*, 1(02), pp. 127–136. Available at: <http://journal.uir.ac.id/index.php/uirlawreview/article/view/952>.
- H. Ras, J.T.S. (2020) 'KEPASTIAN HUKUM DALAM HUKUM INVESTASI DI INDONESIA MELALUI OMNIBUS LAW', 4(1).
- Positum, J.H., Asean, M.E. and Asean, M.E. (2016) 'PENDAFTARAN TANAH SEBAGAI WUJUD KEPASTIAN HUKUM DALAM RANGKA MENGHADAPI MASYARAKAT EKONOMI ASEAN (MEA) Indra Yudha Koswara * Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang 1 . Latar Belakang Penelitian Tata Hukum Indonesia masih pluralistik , yakni ', 1(1), pp. 23–38.
- Purwaningdyah, M.W. and Wahyudi, A. (2014) 'Konsep Dasar Administrasi dan Administrasi Pertanahan', *Administrasi Pertanahan*, pp. 1–39.
- Saim, A. (2016) 'Kepastian Hukum Kepemilikan Hak Milik Atas Tanah Bersertifikat Dihadapkan Dengan Hukum Adat Dalam

Sistem Hukum Pertanahan Di Indonesia’.

Sari, Y. and Jumiati, J. (2020) ‘Evaluasi Berjalan Terhadap Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Ptl) Di Kota Padang’, *Jurnal Manajemen dan Ilmu Administrasi Publik (JMIAP)*, 1(3), pp. 1–12. doi:10.24036/jmiap.v1i3.31.

2. Internet

<https://kot-bandung.atrbpn.go.id/menu/detail/23964/visi-dan-misi>
diakses pada hari Senin, 13 Oktober 2023 pukul 13:00